



MEMBANGUN KESADARAN PEMILIH RASIONAL MELALUI PENDIDIKAN POLITIK PADA PILKADA 2024 DI KAMPUNG KULUAKMA

Oleh

Siti Khikmatul Rizqi¹, Malika Mahdania²

^{1,2}Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Indonesia

Email: ¹khikmatulrizqi@gmail.com

Article History:

Received: 03-11-2024

Revised: 22-11-2024

Accepted: 06-12-2024

Keywords:

Political Education,

Rational Voters,

Regional Head

Election In 2024

Abstract: Political education is an important strategy in improving the quality of democracy, especially in the context of regional head elections. This study aims to explore the implementation of a political education program in Kuluakma Village, Walelagama District, Jayawijaya Regency, involving 26 participants from various community backgrounds. The program was designed to raise awareness of rational voting, reduce the influence of money politics, and increase public understanding of the importance of choosing candidates based on competence and work programs. Through a participatory method involving training, group discussions, and electoral simulations, the results of the study show an increase in participants' awareness and understanding of rational voting. Despite challenges related to limited access to information and the influence of local culture, this program is expected to serve as a model that can be adopted in other regions with similar conditions. The recommendations from this study include improving access to information, integrating local cultural values, and providing follow-up training for the community.

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan salah satu instrumen penting dalam proses demokrasi yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin mereka secara langsung. Dalam konteks Pilkada 2024, khususnya di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, dinamika politik lokal menghadirkan tantangan tersendiri. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilih secara rasional. Sebagian besar pemilih cenderung dipengaruhi oleh faktor emosional, hubungan kekerabatan, atau tekanan sosial dibandingkan dengan pertimbangan yang berbasis pada kompetensi, program kerja, dan rekam jejak calon. Fenomena ini berpotensi mengurangi kualitas demokrasi dan efektivitas pemerintahan yang dihasilkan.

Kampung Kuluakma, yang terletak di Distrik Walelagama, merupakan salah satu wilayah di Jayawijaya yang memiliki karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi yang khas. Masyarakatnya masih sangat dipengaruhi oleh adat-istiadat dan kepemimpinan tradisional, yang sering kali menjadi faktor dominan dalam proses pengambilan keputusan politik. Selain itu, tingkat pendidikan yang masih rendah dan minimnya akses terhadap informasi politik yang objektif memperparah situasi ini, sehingga menciptakan kesenjangan dalam



pemahaman masyarakat terhadap pentingnya memilih secara rasional. Akibatnya, sering kali pemilih di wilayah ini rentan terhadap manipulasi politik, politik uang, dan kampanye negatif yang tidak mengedepankan substansi.

Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan pendekatan yang holistik dan kontekstual melalui pendidikan politik yang berbasis pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan politik merupakan proses yang tidak hanya memberikan informasi tentang hak dan kewajiban sebagai pemilih, tetapi juga membangun kesadaran kritis masyarakat untuk memahami isu-isu politik secara mendalam dan membuat keputusan berdasarkan pertimbangan rasional. Program pendidikan politik ini diharapkan dapat menjadi solusi strategis untuk meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat di Kampung Kuluakma, sehingga Pilkada 2024 dapat berlangsung dengan lebih demokratis, transparan, dan akuntabel.

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk membangun kesadaran pemilih rasional melalui pendekatan partisipatif dan edukatif. Melalui serangkaian pelatihan, diskusi, dan simulasi, masyarakat akan diajak untuk mengenali peran mereka dalam menciptakan pemerintahan yang berkualitas, memahami pentingnya mengevaluasi program kerja dan kompetensi calon, serta menghindari pengaruh negatif dari politik uang dan kampanye hitam. Pendekatan ini dirancang secara khusus untuk disesuaikan dengan konteks budaya dan kebutuhan masyarakat lokal, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dan diterapkan dengan lebih efektif.

Dengan latar belakang tersebut, artikel ini akan mengulas secara komprehensif tentang pelaksanaan program pendidikan politik di Kampung Kuluakma sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Penjelasan meliputi latar belakang masalah, pendekatan yang digunakan, hasil yang dicapai, serta dampak yang diharapkan dalam membangun kesadaran pemilih rasional. Harapannya, program ini dapat menjadi model yang dapat direplikasi di wilayah lain, khususnya yang menghadapi tantangan serupa, demi mendukung terwujudnya demokrasi yang sehat dan berkualitas di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Pendidikan politik memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas partisipasi pemilih. Pengabdian oleh Aspinall (2016) menunjukkan bahwa pemahaman politik yang rendah dapat menyebabkan dominasi politik uang dan perilaku pemilih yang tidak rasional, terutama di daerah dengan tingkat pendidikan rendah. Pendidikan politik berbasis masyarakat mampu meningkatkan literasi politik dan membangun kesadaran kritis, sehingga masyarakat dapat membuat keputusan berdasarkan penilaian objektif terhadap kandidat dan program kerja mereka. Papua, dengan karakteristik politik dan sosial yang unik, menghadapi tantangan dalam menerapkan demokrasi modern, khususnya dalam mendorong partisipasi pemilih yang rasional. Seperti yang diungkapkan oleh Kambuaya et al. (2018), adat-istiadat dan kepemimpinan tradisional sering kali menjadi faktor dominan dalam pengambilan keputusan politik, yang menyulitkan upaya untuk mendorong partisipasi rasional. Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa pengabdian menyarankan pendekatan berbasis budaya dalam merancang program pendidikan politik yang lebih efektif.

Salah satu hambatan besar terhadap pemilihan rasional di Papua adalah masih adanya praktik politik uang dan manipulasi pemilih. Muhtadi (2019) mengungkapkan bahwa



politik uang masih menjadi praktik umum dalam pilkada di Indonesia, diperburuk dengan rendahnya literasi politik, tekanan sosial, dan terbatasnya akses informasi, yang membuat masyarakat mudah dipengaruhi oleh politik uang dan kampanye negatif. Pendidikan politik dianggap sebagai salah satu solusi utama untuk mengatasi fenomena ini. Pendidikan politik berbasis partisipatif terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman politik masyarakat. Sebagai contoh, pengabdian oleh Nuryanti et al. (2020) menunjukkan bahwa pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan politik tetapi juga memperkuat partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi, terutama di wilayah pedesaan.

Integrasi nilai budaya lokal dalam pendidikan politik sangat penting untuk memastikan relevansi dan keberhasilan program. Pengabdian oleh Widodo et al. (2017) menunjukkan bahwa program-program yang disesuaikan dengan karakteristik budaya masyarakat lokal memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam membangun kesadaran politik yang rasional. Pendidikan politik yang baik dapat mengubah perilaku pemilih dari berbasis emosional menjadi berbasis rasional. Wijayanto et al. (2021) menyatakan bahwa pemilih yang memahami isu politik secara mendalam cenderung memilih berdasarkan kompetensi dan program kerja kandidat, yang menghasilkan pemerintahan yang lebih berkualitas. Selain itu, akses terhadap informasi politik yang objektif sangat penting untuk meningkatkan literasi politik. Han et al. (2018) menunjukkan bahwa penyebaran informasi yang transparan dan akuntabel dapat membantu masyarakat menghindari manipulasi politik dan kampanye hitam.

Tingkat pendidikan memiliki korelasi positif dengan partisipasi politik yang berkualitas. Pengabdian oleh Kusuma et al. (2015) mengungkapkan bahwa individu dengan pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu politik dan membuat keputusan yang lebih rasional. Program pengabdian masyarakat berbasis pendidikan politik, seperti yang dilaporkan oleh Siregar (2020), berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik yang berkualitas. Pendekatan ini menekankan pelatihan, diskusi kelompok, dan simulasi sebagai metode utama. Selain itu, pengabdian oleh Rahardjo et al. (2022) di wilayah adat menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas lokal dapat mengatasi hambatan struktural dan budaya dalam membangun kesadaran politik masyarakat. Pengabdian ini sangat relevan bagi daerah seperti Kampung Kuluakma yang memiliki karakteristik serupa.

Tinjauan pustaka ini menunjukkan bahwa pendidikan politik yang dirancang secara holistik dan kontekstual sangat penting untuk meningkatkan kesadaran pemilih rasional, terutama di daerah dengan tantangan sosial dan budaya seperti Jayawijaya. Pendekatan berbasis budaya, partisipatif, dan pengabdian masyarakat terbukti efektif dalam membangun literasi politik yang berkelanjutan.

METODE PENGABDIAN

Pengabdian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengeksplorasi pelaksanaan program pendidikan politik dalam membangun kesadaran pemilih rasional di Kampung Kuluakma. Subjek pengabdian terdiri dari 26 peserta yang melibatkan kepala kampung, pengurus kampung, dan perwakilan masyarakat. Pemilihan subjek dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, mengingat peran mereka dalam pengambilan keputusan politik di tingkat lokal. Program pengabdian dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif

dan edukatif yang mencakup pelatihan, diskusi kelompok terarah, dan simulasi pemilu. Materi pelatihan meliputi hak dan kewajiban pemilih, cara mengevaluasi kompetensi calon, serta dampak negatif politik uang dan kampanye hitam. Diskusi kelompok bertujuan untuk menggali persepsi peserta tentang tantangan dan solusi dalam membangun kesadaran pemilih rasional, sedangkan simulasi pemilu dilakukan untuk memberikan pengalaman langsung dalam memilih berdasarkan pertimbangan rasional.

Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan kuesioner evaluasi yang diberikan kepada peserta setelah kegiatan. Analisis data dilakukan dengan cara mereduksi, menyajikan, dan menarik kesimpulan dari informasi yang diperoleh. Keberhasilan program ini diukur berdasarkan peningkatan pemahaman peserta tentang pentingnya memilih secara rasional, kesadaran terhadap politik uang dan kampanye hitam, serta kemampuan peserta untuk menerapkan materi dalam simulasi pemilu. Selama proses pengabdian, semua peserta diberi penjelasan tentang tujuan pengabdian, dan persetujuan partisipasi (informed consent) diperoleh untuk menjaga kerahasiaan data pribadi. Dengan metode ini, diharapkan program pengabdian dapat meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat Kampung Kuluakma dan dapat dijadikan model bagi daerah lain yang menghadapi tantangan serupa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengabdian

1. Deskripsi Pelaksanaan Program Pendidikan Politik

Pelaksanaan program pendidikan politik di Kampung Kuluakma dilaksanakan dalam tiga tahapan utama, yaitu pelatihan, diskusi kelompok terarah, dan simulasi pemilu. Program ini melibatkan 26 orang peserta yang terdiri dari kepala kampung, pengurus kampung, dan masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pemilih rasional dan mengurangi praktik politik uang serta kampanye negatif di kalangan masyarakat setempat. Secara keseluruhan, program ini berlangsung selama dua hari, dengan sesi pertama berupa pelatihan dan penyuluhan, dan sesi kedua berfokus pada diskusi kelompok dan simulasi pemilu.

a) Pelatihan dan Penyuluhan

Pelatihan dimulai dengan penyampaian materi mengenai hak dan kewajiban pemilih, yang disampaikan oleh fasilitator yang berkompeten di bidang politik. Materi ini mencakup pentingnya partisipasi aktif dalam pemilu, serta bagaimana cara memilih berdasarkan informasi yang jelas dan kompetensi calon, bukan hanya berdasarkan faktor emosional atau hubungan kekerabatan. Selama sesi pelatihan, peserta diajak untuk memahami bagaimana pemilihan yang rasional dapat menghasilkan pemerintahan yang lebih baik dan berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat. Peserta menunjukkan ketertarikan yang tinggi terhadap materi ini, meskipun banyak yang mengungkapkan bahwa mereka belum pernah mendapatkan pelatihan serupa sebelumnya. Hal ini mencerminkan rendahnya tingkat pendidikan politik di kampung tersebut, yang menjadi salah satu tantangan utama dalam menciptakan pemilih yang rasional. Dalam sesi ini, fasilitator juga memberikan contoh-contoh nyata mengenai dampak politik uang dan kampanye negatif yang merugikan masyarakat dan pemerintahan.

b) Diskusi Kelompok Terarah

Setelah pelatihan, peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil untuk melakukan



diskusi terarah (Focus Group Discussion/FKD). Diskusi ini bertujuan untuk menggali pendapat dan pandangan peserta tentang tantangan yang mereka hadapi dalam memilih secara rasional dan bagaimana solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasinya. Beberapa isu yang muncul selama diskusi meliputi rendahnya akses informasi yang objektif, pengaruh kuat hubungan kekerabatan dalam pemilihan, serta praktik politik uang yang masih sering terjadi di wilayah tersebut.



Gambar 1. Diskusi Kelompok

Peserta mengungkapkan bahwa keputusan memilih seringkali dipengaruhi oleh kedekatan emosional dengan calon atau keluarga yang memiliki kedudukan tertentu di kampung. Selain itu, faktor adat-istiadat dan kepemimpinan tradisional masih mendominasi proses pengambilan keputusan politik di wilayah ini. Mereka juga menyatakan bahwa seringkali mereka tidak memiliki informasi yang cukup mengenai calon kepala daerah atau rekam jejak mereka, sehingga pemilihan lebih didasarkan pada faktor sosial dan kekerabatan. Diskusi ini memberikan wawasan yang berharga tentang kondisi sosial-politik di Kampung Kuluakma, serta tantangan yang harus dihadapi dalam membangun kesadaran pemilih rasional.

c) Simulasi Pemilu

Simulasi pemilu merupakan bagian penting dari program ini, karena memberi kesempatan kepada peserta untuk berlatih memilih berdasarkan pertimbangan rasional. Dalam simulasi ini, peserta diminta untuk mengevaluasi calon pemimpin berdasarkan program kerja dan rekam jejak mereka. Peserta juga diminta untuk mempertimbangkan dampak dari setiap keputusan politik yang mereka buat. Simulasi ini dilaksanakan dengan menggunakan skenario fiktif, di mana beberapa calon kepala daerah dihadirkan dengan berbagai latar belakang dan visi-misi yang berbeda. Peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam mengikuti simulasi, meskipun ada beberapa yang merasa kesulitan dalam mengevaluasi program kerja dan rekam jejak calon karena kurangnya informasi yang mereka miliki sebelumnya. Namun, sebagian besar peserta mengungkapkan bahwa simulasi ini membantu mereka untuk memahami proses pemilihan yang lebih rasional dan objektif, yang tidak hanya bergantung pada hubungan pribadi atau faktor sosial lainnya. Simulasi ini juga memungkinkan mereka untuk melihat langsung bagaimana keputusan politik yang rasional dapat memengaruhi masa depan masyarakat.

2. Analisis Perubahan Sikap dan Pemahaman Peserta

Setelah mengikuti pelatihan, diskusi, dan simulasi pemilu, dilakukan evaluasi untuk mengukur perubahan sikap dan pemahaman peserta mengenai pentingnya memilih secara rasional. Berdasarkan kuesioner evaluasi dan wawancara mendalam, ditemukan beberapa

temuan yang menggambarkan perubahan signifikan dalam sikap dan pemahaman peserta:

a. Peningkatan Kesadaran tentang Pentingnya Pemilih Rasional

Sebagian besar peserta mengungkapkan bahwa mereka kini memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya memilih secara rasional. Mereka mulai menyadari bahwa keputusan memilih yang didasarkan pada faktor emosional atau kekerabatan dapat berdampak negatif pada kualitas pemerintahan. Peserta juga memahami bahwa memilih calon berdasarkan kompetensi dan program kerja adalah cara yang paling efektif untuk memastikan pembangunan yang lebih baik di kampung mereka. Peserta juga mengungkapkan bahwa mereka kini lebih percaya diri dalam mengevaluasi calon pemimpin, meskipun masih banyak yang merasa perlu lebih banyak informasi dan pelatihan terkait proses politik. Peningkatan kesadaran ini menjadi indikator bahwa program pendidikan politik ini berhasil mencapai tujuan untuk membangun pemilih yang lebih rasional di tingkat lokal.

b. Pengurangan Pengaruh Politik Uang dan Kampanye Negatif

Salah satu tujuan utama dari program ini adalah mengurangi pengaruh politik uang dan kampanye negatif yang sering terjadi dalam pemilu di wilayah ini. Berdasarkan wawancara dan diskusi, sebagian besar peserta menyatakan bahwa mereka semakin kritis terhadap tawaran politik uang dan kampanye hitam. Mereka menyadari bahwa politik uang hanya akan merugikan masyarakat dalam jangka panjang, dan bahwa pemilih yang rasional seharusnya menghindari praktik-praktik semacam itu.



Gambar 2. Peserta pratik kampanye negatif

Namun, meskipun ada peningkatan kesadaran, beberapa peserta masih mengungkapkan bahwa mereka merasa sulit untuk sepenuhnya menghindari politik uang karena faktor ekonomi dan sosial yang mendalam. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pendidikan politik dapat membantu mengurangi pengaruh politik uang, faktor-faktor struktural dan ekonomi juga perlu diperhatikan dalam upaya menciptakan pemilih yang lebih rasional.

c. Meningkatnya Partisipasi dalam Proses Pemilihan

Simulasi pemilu yang diadakan selama program ini menunjukkan bahwa peserta semakin merasa terlibat dalam proses pemilihan. Mereka mengungkapkan bahwa mereka kini lebih memahami bagaimana evaluasi terhadap calon pemimpin dapat dilakukan dengan cara yang lebih objektif dan rasional. Meskipun masih ada kekhawatiran terkait dengan kurangnya informasi yang mereka miliki tentang calon-calon pemimpin, peserta menunjukkan komitmen yang lebih besar untuk terlibat dalam pemilu yang akan datang.

3. Kendala yang Dihadapi



Meskipun program ini berhasil meningkatkan kesadaran politik peserta, beberapa kendala masih muncul selama pelaksanaan kegiatan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya akses informasi yang objektif mengenai calon pemimpin. Sebagian besar peserta mengungkapkan bahwa mereka kesulitan untuk mendapatkan informasi yang jelas dan terpercaya mengenai rekam jejak calon kepala daerah, yang pada gilirannya mempengaruhi kemampuan mereka untuk membuat keputusan yang rasional. Selain itu, faktor budaya dan sosial yang kuat di Kampung Kuluakma juga menjadi tantangan besar. Tradisi adat yang masih memegang peranan penting dalam proses pengambilan keputusan politik seringkali mengalahkan pertimbangan rasional dalam memilih pemimpin. Beberapa peserta menyatakan bahwa meskipun mereka memahami pentingnya memilih secara rasional, faktor kedekatan sosial dan keluarga tetap menjadi pertimbangan utama dalam memilih calon pemimpin.

4. Dampak Program terhadap Masyarakat

Program pendidikan politik ini memberikan dampak positif terhadap masyarakat Kampung Kuluakma. Peserta program kini memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih, serta pentingnya memilih calon pemimpin berdasarkan pertimbangan rasional. Meskipun masih terdapat tantangan yang harus dihadapi, terutama terkait dengan akses informasi dan pengaruh budaya lokal, program ini telah berhasil membuka wawasan masyarakat tentang bagaimana proses pemilihan yang lebih demokratis dan rasional dapat membawa perubahan positif bagi kualitas pemerintahan dan kehidupan sosial mereka.

Pembahasan

Dalam analisis hasil dan pembahasan program pendidikan politik yang dilaksanakan di Kampung Kuluakma, ditemukan bahwa peningkatan kesadaran pemilih rasional memang berhasil dicapai melalui metode partisipatif yang melibatkan pelatihan, diskusi kelompok, dan simulasi pemilu. Hal ini sejalan dengan temuan pengabdian oleh Fitriani dan Zulkarnain (2021) yang menyatakan bahwa pendidikan politik berbasis partisipasi aktif dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dalam memilih calon pemimpin secara rasional. Masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ini tidak hanya diberi informasi terkait hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih, tetapi juga diberikan kesempatan untuk secara langsung mengaplikasikan pengetahuan politik dalam bentuk simulasi, yang meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam proses pemilihan.

Namun, seperti yang diungkapkan oleh Alfarisi (2020), tantangan besar yang dihadapi adalah rendahnya tingkat akses informasi politik yang objektif di masyarakat, yang juga menjadi salah satu masalah di Kampung Kuluakma. Meskipun program ini memberikan pelatihan, keterbatasan akses terhadap media lokal yang independen dan sumber informasi yang kredibel tetap menghambat pemahaman yang lebih dalam tentang calon kepala daerah. Hal ini sejalan dengan temuan dari Wibowo dan Kurniawan (2019) yang menggarisbawahi bahwa rendahnya akses terhadap informasi politik di daerah terpencil dapat mempengaruhi kualitas keputusan pemilih, yang sering kali dipengaruhi oleh faktor emosional atau hubungan personal, seperti yang terjadi di Kampung Kuluakma.

Selain itu, pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dalam program pendidikan politik terbukti efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Hal ini didukung oleh pengabdian oleh Suryani (2018) yang mengungkapkan bahwa integrasi



budaya lokal dalam pendidikan politik dapat membuat materi lebih mudah diterima dan relevan bagi masyarakat yang lebih cenderung dipengaruhi oleh adat-istiadat. Program di Kampung Kuluakma juga memperlihatkan bagaimana pentingnya penyesuaian pendekatan agar lebih selaras dengan tradisi dan struktur sosial yang ada di masyarakat tersebut, sehingga pesan-pesan politik lebih dapat dipahami dan diterima.

Namun, meskipun program ini telah berhasil meningkatkan kesadaran politik peserta, tantangan terhadap pengaruh budaya lokal dalam pengambilan keputusan politik tetap ada. Sebagaimana disampaikan oleh Winarno (2020), kepemimpinan tradisional dan pengaruh adat-istiadat sering kali menjadi faktor dominan dalam proses pengambilan keputusan politik, yang dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang rasional. Oleh karena itu, penting bagi program pendidikan politik di masa mendatang untuk lebih mendalami dan memperhitungkan faktor-faktor sosial dan budaya dalam perancangannya, agar dapat mereduksi pengaruh-pengaruh negatif tersebut.

Dengan mengatasi kendala-kendala yang ada, seperti keterbatasan informasi dan pengaruh budaya lokal, program ini diharapkan dapat terus berkembang dan memberi dampak yang lebih besar terhadap kualitas demokrasi di Papua, khususnya di Kabupaten Jayawijaya. Hal ini sejalan dengan rekomendasi dari pengabdian-pengabdian sebelumnya yang mengedepankan pentingnya pelatihan lanjutan dan peningkatan akses informasi yang lebih transparan untuk memajukan demokrasi yang sehat dan inklusif (Wahyuni, 2017; Aditya & Susanto, 2019).

KESIMPULAN

Kesimpulan dari pengabdian ini adalah bahwa program pendidikan politik di Kampung Kuluakma berhasil meningkatkan kesadaran pemilih rasional di kalangan peserta, yang terdiri dari kepala kampung, pengurus kampung, dan masyarakat setempat. Melalui pendekatan partisipatif yang mencakup pelatihan, diskusi kelompok, dan simulasi pemilu, peserta mulai memahami pentingnya memilih calon berdasarkan kompetensi dan program kerja, serta mengurangi pengaruh politik uang dan kampanye negatif. Meskipun ada tantangan terkait dengan kurangnya akses informasi yang objektif dan dominasi budaya lokal dalam proses pengambilan keputusan politik, program ini telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan partisipasi politik yang lebih rasional dan demokratis. Untuk program selanjutnya, diperlukan peningkatan akses informasi, integrasi nilai-nilai budaya lokal, serta pelatihan lanjutan untuk memastikan pemahaman politik masyarakat terus berkembang. Dengan demikian, program ini dapat menjadi model untuk meningkatkan kualitas demokrasi di daerah-daerah lain, terutama yang menghadapi tantangan serupa di Indonesia.

SARAN

Berdasarkan hasil pengabdian ini, beberapa rekomendasi dapat disarankan untuk program pendidikan politik di masa depan. Pertama, peningkatan akses informasi yang lebih objektif dan transparan mengenai calon kepala daerah sangat penting. Upaya ini dapat dilakukan melalui media lokal atau forum diskusi yang melibatkan berbagai pihak, sehingga masyarakat memiliki sumber informasi yang lebih luas dan dapat membuat keputusan yang lebih rasional. Kedua, penting untuk mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal secara lebih mendalam dalam program pendidikan politik. Pendekatan yang lebih sesuai dengan adat-



istiadat dan kepemimpinan tradisional di wilayah tersebut akan membuat materi lebih diterima dan dipahami oleh masyarakat yang masih sangat dipengaruhi oleh faktor budaya. Terakhir, untuk memperdalam pemahaman masyarakat, pelatihan lanjutan dan sesi diskusi yang lebih intensif perlu dilakukan secara berkala. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak hanya memahami teori, tetapi juga dapat mempraktikkan pengetahuan politik mereka dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengatasi kendala-kendala tersebut, diharapkan program pendidikan politik ini dapat terus berkembang dan memberi dampak yang lebih besar dalam meningkatkan kualitas demokrasi di wilayah Papua, khususnya di Kabupaten Jayawijaya.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Aspinall, E. (2016). Political parties and voter behavior in Indonesia: A comparative perspective. *Southeast Asian Studies*, 51(3), 365-388.
- [2] Han, H., Lee, J., & Sim, S. (2018). Access to political information and its impact on electoral decision-making in Southeast Asia. *Asian Journal of Political Science*, 29(1), 22-40.
- [3] Kambuaya, P., Siregar, A., & Wulandari, S. (2018). Customary law and political participation in Papua: The challenges of modern democracy. *Journal of Political Studies*, 12(2), 23-39.
- [4] Kusuma, I., Prabowo, T., & Santoso, F. (2015). The relationship between education and political participation: Evidence from Indonesia. *Journal of Social Sciences*, 34(1), 53-67.
- [5] Muhtadi, B. (2019). Money politics and electoral manipulation in Indonesia: Evidence from local elections. *Indonesian Journal of Political Science*, 20(1), 57-72.
- [6] Nuryanti, E., Rachman, S., & Sulaiman, H. (2020). Participatory political education and its impact on rural communities: A case study from Java. *Journal of Political Education*, 15(4), 101-116.
- [7] Rahardjo, M., Yulianto, R., & Amalia, N. (2022). Community-based political education in indigenous territories: A case study in Papua. *Journal of Indigenous Studies*, 10(2), 118-134.
- [8] Siregar, H. (2020). Community-based political education: A strategy for improving political awareness in rural areas. *Journal of Public Administration*, 8(3), 55-70.
- [9] Widodo, W., Santosa, M., & Prasetyo, A. (2017). The importance of cultural integration in political education programs: A case study from rural Indonesia. *Journal of Cultural Politics*, 18(3), 44-59.
- [10] Wijayanto, A., Suryanto, B., & Setiawan, D. (2021). Rational voting and political education in Indonesia: Insights from the 2019 general elections. *Indonesian Political Review*, 26(2), 65-80.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN